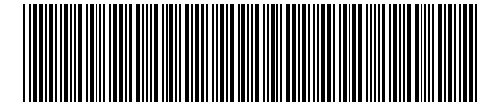




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408766/2020**



DS:8976-2419-2018-3964

Revisi ke 01

Tanggal : 18 Februari 2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 3. Provinsi | : (07) | SUMATERA UTARA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408766) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN |
| Sebesar | : Rp. | 184.200.000 (SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.06 Program Pembentukan Hukum
013.08.06.5250 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	184.200.000
Rp.	184.200.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 184.200.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN M E D A N I | (004) Rp. | 184.200.000 |
|---------------------|-----------|-------------|

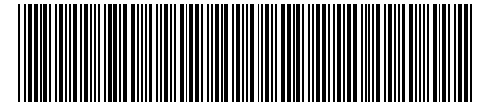
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408766/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8976-2419-2018-3964

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (408766) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Sutrisman
Bendahara Pengeluaran : GABY MARINTAN ANANDA
Pejabat Penanda Tangan SPM : SISMOLO

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			184.200.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			184.200.000
2 Program	013.08.06	Program Pembentukan Hukum			184.200.000
Sasaran Program	01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80	%	
	02	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	200	orang	
	03	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80	%	
Output Program	01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Output Program	01	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80	%	
	02	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	200	orang	
	03	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80	%	
Kegiatan	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah			184.200.000
Sasaran Kegiatan	01	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah			
	02	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan			
Output Kegiatan	5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	27 Raperda		172.667.000
Output Kegiatan	5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	31 Orang		11.533.000

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

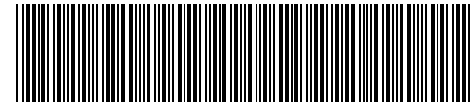
ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.08.2.408766/2020

I B. SUMBER DANA



DS:8976-2419-2018-3964

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
 Kode>Nama Satker : (408766) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

		Rp.	184.200.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2020					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.	184.200.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408766/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8976-2419-2018-3964

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (408766) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408766	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	-	184.200	-	-	-	184.200		
013.08.06	Program Pembentukan Hukum	-	184.200	-	-	-	184.200		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	-	184.200	-	-	-	184.200		
5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	-	172.667	-	-	-	172.667	07 . 51	
01	RM	-	172.667	-	-	-	172.667	004	
5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	-	11.533	-	-	-	11.533	07 . 51	
01	RM	-	11.533	-	-	-	11.533	004	
JUMLAH		-	184.200	-	-	-	184.200		

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408766/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8976-2419-2018-3964

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (408766) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408766	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	56.092	24.433	800	80.250	22.625	0	0	0	0	0	0	184.200
		52 BELANJA BARANG	0	56.092	24.433	800	80.250	22.625	0	0	0	0	0	0	184.200
	013.08.06.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	0	56.092	24.433	800	80.250	22.625	0	0	0	0	0	0	184.200
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	56.092	24.433	800	80.250	22.625	0	0	0	0	0	0	184.200

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408766/2020
IV A. B L O K I R**



DS:8976-2419-2018-3964

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [408766] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408766/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:8976-2419-2018-3964

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [408766] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001